

Peran Kehumasan Dalam Membangun Citra Pemerintah di Kabupaten Kutai Barat

Wiji Kasmirus

Abstrak

Citra dan Reputasi sebuah lembaga yang positif akan menunjang kinerja lembaga, Jika sebuah lembaga memiliki citra positif maka dukungan publik (Stakeholder) akan mengalir dengan sendirinya. Dukungan publik sangat mutlak diperlukan bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Sebuah lembaga tidak akan pernah hidup dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik (Stakeholder). Peran kehumasan dalam membangun citra Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Kutai Barat, lembaga kehumasan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah bisa lebih secara arif, bijaksana, profesional dan proporsional. dapat memberikan kontribusi dan dukungan terhadap aparatur serta masyarakat secara umum

Kata Kunci: Kehumasan, Citra, Pemerintah

Pendahuluan

Sebagai Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan serta memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dipaparkan bagaimana Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diharapkan dapat merespon dan memberikan solusi berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era reformasi seperti saat sekarang sedang berlangsung.

Melalui Undang-Undang tersebut Daerah Otonom telah dan akan diberi kewenangan secara nyata, luas dan bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang lebih luas, berarti Daerah Otonomi memiliki kebebasan yang lebih besar untuk

menentukan masa depannya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan dan mengacu kepada peraturan perundang undangan yang berlaku. Otonomi daerah juga tidak dapat diartikan hanya sebagai penyerahan kewenangan kepada birokrasi daerah. Akan tetapi lebih menekankan terhadap masyarakat daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi dan pertimbangan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Otonomi daerah akan menjadi faktor terpenting bagi munculnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih berkualitas dalam menyelenggarakan pelayanan prima serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan manajemen pemerintahan yang lebih banyak dilakukan dan dilaksanakan sendiri, maka responsibilitas pemerintahan daerah akan semakin kuat, begitu juga dengan akuntabilitas publiknya. Dan diharapkan adanya *check and balance* antara kedua lembaga tersebut guna terwujudnya tata pemerintahan yang baik, jujur dan bersih yang mengarah kepada *Good governance*.

Dalam era globalisasi serta kompetisi yang semakin ketat maka membangun citra dan reputasi pemerintahan merupakan tuntutan yang sangat mendesak dan wajib dicermati oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. *Citra* adalah persepsi publik tentang sesuatu bias individu, juga bias lembaga. *Reputasi* adalah nama baik atau sebuah kepercayaan oleh seseorang atau siapapun yang memiliki kewenangan untuk memberikannya kepada siapapun yang pantas untuk menerima penghargaan atas upaya yang telah dilakukannya. *Citra dan Reputasi* dibentuk oleh informasi yang diterima individu, jika informasinya positif maka citra dan reputasinya positif sebaliknya jika informasinya negatif maka akan membentuk citra dan reputasi yang negatif pula. Setiap Lembaga menginginkan citra dan reputasi yang positif, namun harapan seperti ini tidak mudah dicapai atau diraih. Untuk itu sebuah lembaga pemerintah secara terus menerus perlu berupaya membangun citra dan reputasi yang positif.

Citra dan Reputasi sebuah lembaga yang positif akan menunjang kinerja lembaga tersebut, Jika sebuah lembaga memiliki citra positif maka dukungan publik (*Stakeholder*) akan mengalir dengan sendirinya. Dukungan publik sangat mutlak diperlukan bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Sebuah lembaga tidak

akan pernah hidup dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik (*Stakeholder*). Upaya untuk memperoleh dukungan adalah dengan membangun citra dan reputasi secara terus menerus. Sementara citra dan reputasi yang buruk, akan membawa lembaga tersebut pada keterpurukan atau hilangnya kepercayaan dan dukungan publik secara perlahan lahan bahkan secara drastis.

Lembaga atau organisasi adalah suatu organisme yang hidup, tumbuh, berkembang dan mempunyai kemungkinan suatu waktu, mengalami masa surut atau musim gugur untuk kemudian mengalami masa keruntuhannya. Lembaga Swasta juga lembaga pemerintah bisa saja mengalami hal seperti ini. Adalah keliru jika ada anggapan bahwa lembaga pemerintah tidak perlu melakukan upaya untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang tanpa dukungan publik. Anggapan ini didasari pada pemahaman bahwa lembaga pemerintah tidak butuh publik, publiklah yang membutuhkan mereka. Dalam era saat ini tidak dapat lagi suatu lembaga beranggapan demikian mengingat bahwa lembaga apapun harus mendapat dukungan publik.

Dukungan publik sangat mutlak dibutuhkan sebuah lembaga untuk kelangsungan dalam menjalankan sebuah kebijakan termasuk mekanismenya. Salah satu upaya untuk mendapatkan dukungan publik adalah dengan membangun citra dan reputasi yang positif.

Peranan Humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak saat ini, wajib dilaksanakan di semua instansi pemerintah, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif. Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Dan di era keterbukaan sekarang ini Humas mempunyai peran yang penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang

berlangsung dua arah dan timbal balik. Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi.

Sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal, di mana secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara defenitif, Humas adalah suatu fungsi manajemen yang bertujuan menjembatani antara organisasi dan *stakeholder* baik di luar maupun di dalam. Apa pun yang terjadi di organisasi, Humas harus tahu. Humas harus mengetahui segala kebijakan dari tujuan organisasi. Jadi Humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, dan sangat membutuhkan dukungan publik. Bagaimana mungkin publik mau atau mendukung, ketika tidak mampu menterjemahkan dan mengetahui maksud serta tujuan kebijakan yang dipublikasikan. Di samping itu, sering ditemui masalah yaitu kebijakan publik yang diambil dan ditetapkan oleh seorang pejabat ditanggapi salah oleh masyarakat. Ini terjadi, karena kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait serta maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk itu sangat diperlukan penyampai pesan yang baik serta mudah diterjemahkan maksud dan tujuannya oleh publik dan peranan humasah yang harus mampu memfasilitasinya segalanya. Humas juga berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan di pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina reputasi instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Selain itu, seiring pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menjadikan peran aparatur Humas dan lembaga kehumasan pemerintah sebagai jembatan antara kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat. Fungsi Humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki

kualifikasi yang memadai. Dengan pelaksanaan peran Humas tersebut, maka kegiatan-kegiatan Humas pada dasarnya diarahkan :

Pertama, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi, aktivitas dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah atau kebijaksanaan di masing-masing satuan kerja (satker) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Kedua, menangkap aspirasi masyarakat dan menyampaikan kepada pemerintah atau satuan kerja perangkat daerah di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ketiga, mewujudkan integrasi, keserasian dan keselarasan antara kepentingan pemerintah / instansi dan kepentingan masyarakat.

Keempat, mendorong dan menegakkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan dan,

Kelima, meningkatkan dan membina secara baik citra dan martabat pemerintah dan instansi dalam hal ini satuan kerja / SKPD di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Dengan gambaran tupoksi tersebut, *revitalisasi* peran Humas pemerintah daerah mutlak diperlukan, mengingat ke depan peran humas sangat strategis dalam kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Peran dan fungsi kehumasan perlu direvitalisasi agar dalam memberikan berita atau informasi bisa cermat dan akurat. Fungsi humas bukan sekadar memberi informasi akan tetapi citra (*image*) yang dikeluarkan memang benar-benar untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

Dewasa ini Humas dituntut untuk menghadapi dan mempunyai fungsi yang beragam, tentunya dengan bersikap profesional. Bersikap profesional, yaitu berfikir secara rasional, orientasinya bertanggung jawab kepada masyarakat, baik pemahaman termasuk realisasinya. Sehingga *Public Relation* secara *continoe*

mampu meminimalisasi munculnya keluhan, konflik, isu-isu dan sebagainya. Fungsi *Public Relation* yang dilaksanakan dengan baik benar-benar merupakan alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau perusahaan, suasana kerja yang kondusif, peka terhadap

karyawan yang perlu pendekatan khusus, perlu dimotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja dan kinerjanya. Itu semua menunjukkan bahwa *Public Relation* berakar pola pikir pragmatis dan harmonis, terutama dalam meminimalisir konflik, dengan menggunakan pendekatan, komunikasi timbal balik akan sangat membantu menemukan strategi bagaimana mengatasi konflik yang terjadi.

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsi dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu berada memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya Citra yang baik.

Sedangkan keberadaan Humas dan Protokol di Pemerintahan bertujuan menyampaikan informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu mengembangkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pada masyarakat. Sehingga Humas di Pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian peran dan fungsinya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, agar Humas Pemerintah mampu membangun Citra Pemerintah yang baik. Untuk masyarakat sekarang ini peran dan pengaruh Humas dan Protokol sangat terasa. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam dan oleh masyarakat yang tidak memerlukan pemberitaan. Karena berita sudah menjadi kebutuhan utama.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, definisi Humas memiliki peran sebagai juru bicara pemerintah daerah, mempublikasikan tentang keunggulan daerahnya meliputi pembangunan pemerintahan serta mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat secara umum dan merata. Tak hanya itu saja, Humas juga berperan sebagai mitra pencitraan *good goverment* dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada khalayak ramai.

Selain mempublikasikan tentang pembangunan pemerintahan, Humas juga menampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang menyoroti keberadaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang tidak hanya menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, tetapi juga melebur dengan masyarakat. Sehingga, hal ini mewujudkan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mengembangkan citra positif maka beberapa hal berikut sangat penting diketahui :

1. Lembaga Pemerintah adalah lembaga pelayanan, karenanya ia harus dapat melayani semua lapisan masyarakat.
2. Mengabaikan pelayanan, berarti juga mengabaikan pemilih-pemilih mereka. Masyarakat adalah pembayar pajak dan merekalah yang membiayai operasional lembaga dimaksud. Karena itu mereka berhak pula mendapatkan pelayanan yang terbaik.
3. Sikap dan perilaku simpatik, responsif menjadi bagian tidak terpisahkan dari layanan.
4. Membangun hubungan yang saling membutuhkan, saling mempercayai, menumbuhkan rasa nyaman, keramah tamahan dan *equality*.
5. Membangun komunikasi yang equal dilakukan dengan menyampaikan dan menerima informasi. Kita hanya dituntut pandai bicara namun yang pandai mendengarkan masyarakat yakni memahami kepentingan dan kebutuhannya.
6. Komunikasi dilandasi oleh keterbukaan dan kejujuran. Masyarakat telah berubah, mereka berani mengemukakan opininya baik secara langsung maupun melalui media, karenanya keterbukaan menjadi kunci dalam membangun hubungan yang *equal*.

Memang semua indikasi diatas tidak hanya menjadi permasalahan dari peran kehumasan dalam membangun citra pemerintahan, tetapi sebagian juga merupakan permasalahan dari membangun citra Pemerintah.

Peran Kehumasan Dalam Membangun Citra Pemerintahan.

Dalam era globalisasi serta kompetisi yang semakin ketat maka membangun citra dan reputasi merupakan tuntutan yang sangat mendesak dan wajib dicermati oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Citra adalah persepsi publik tentang sesuatu bias individu, juga bias lembaga. Reputasi adalah nama baik atau sebuah kepercayaan oleh seseorang atau siapapun yang memiliki kewenangan untuk memberikannya kepada siapapun yang pantas untuk menerima penghargaan atas upaya yang telah dilakukannya. Citra dan Reputasi dibentuk oleh informasi yang diterima individu, jika informasinya positif maka citra dan reputasinya positif sebaliknya jika informasinya negatif maka akan membentuk citra dan reputasi yang negatif.

Setiap Lembaga menginginkan citra dan reputasi yang positif, namun harapan seperti ini tidak mudah dicapai atau diraih. Untuk itu sebuah lembaga pemerintah secara terus menerus perlu berupaya membangun citra dan reputasi yang positif.

Citra dan Reputasi sebuah lembaga yang positif akan menunjang kinerja lembaga tersebut, Jika sebuah lembaga memiliki citra positif maka dukungan publik (*stakeholder*) akan mengalir dengan sendirinya. Dukungan publik sangat mutlak diperlukan bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Sebuah lembaga tidak akan pernah hidup dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari publik (*stakeholder*). Upaya untuk memperoleh dukungan adalah dengan membangun citra dan reputasi secara terus menerus.

Keterbukaan Dalam Informasi Pemerintahan.

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan kepada masyarakat. Terutama di Indonesia lembaga kehumasan sangatlah diperlukan. Humas ini merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu memperoleh kepercayaan dari publiknya, yaitu masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik.

Sedangkan keberadaan dari Humas dan Protokol di Pemerintahan bertujuan menyampaikan informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu mengembangkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan pada masyarakat. Sehingga Humas di Pemerintah harus melakukan penyesuaian-penyesuaian peran dan fungsinya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, supaya Humas Pemerintah mampu membangun citra Pemerintah yang baik.

Untuk masyarakat sekarang ini peran dan pengaruh Humas dan Protokol sangat terasa. Tidak ada kegiatan yang dilakukan di dalam dan oleh masyarakat yang tidak memerlukan pemberitaan. Karena berita sudah menjadi kebutuhan utama. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Humas memiliki peran sebagai juru bicara pemerintah daerah, mempublikasikan tentang keunggulan daerahnya meliputi pembangunan pemerintahan serta mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Barat. Tak hanya itu saja, Humas juga berperan sebagai mitra pencitraan atau *good will* dengan media massa sehingga jalinan kerjasama antara pemerintah yang diwakili oleh Humas dengan media massa berjalan dengan baik dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Toni Imang sebagai Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menjadi *key man* bagi penulis : “Peran Pemerintah dalam memberikan Informasi tentang semua sektor pembangunan kepada masyarakat sangatlah penting dimana setiap program-program pemerintah dimaksud, wajib dan harus dipublikasikan. Karena semuanya adalah amanah yang wajib diketahui oleh semua lapisan masyarakat dari pemerintah sebagai obyek pelaksana dan penyelenggara pembangunan”. (Wawancara dengan bapak Toni Imang, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 05 April 2012).

Selain mempublikasikan tentang pembangunan yang dilaksanakan pemerintahan, Humas juga menampung informasi yang menjadi sorotan dan keluhan masyarakat, baik yang menyoroti tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak hanya menjadi bagian dari Pemerintah Daerah, tetapi juga melebur

dengan masyarakat. Hal ini disampaikan juga oleh Asisten Pemerintah, Hukum dan Humas Kabupaten Kutai Barat yaitu bapak Murni Neri : “Peran kehumasan ini memang luas dimana humas sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan tugas pemerintah, dalam hal ini selain berperan mempublikasikan tentang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Humas juga sebagai penampung informasi yang menjadi keluhan masyarakat, baik yang spesifikasinya tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah saja, tapi sekaligus penyaluran aspirasi, dan keinginan masyarakat itu sendiri”. (*Wawancara dengan bapak Murni Neri, Asisten Pemerintah, Hukum dan Humas Kabupaten Kutai Barat, 05 April 2012*).

Dengan melihat peran dan fungsi kehumasan begitu penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat maka lembaga Kehumasan harus bisa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat hal ini disampaikan juga oleh salah satu tokoh masyarakat dan kepala lembaga peneliti pembangunan Kabupaten Kutai Barat yaitu bapak Yovenalis Lahajir: “Pemerintah atau humas hendaknya lebih terbuka dan lebih transparan didalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, supaya didalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sekaligus mendapat dukungan masyarakat. Dan dapat saya pastikan, jika peran kehumasan dimaksud dijalankan dengan transparan dan keterbukaan informasi, maka image masyarakat terhadap pemerintah, tetap bertahan dan tetap mendapatkan dukungan dan kepercayaan sebagai mitra yang baik dalam proses pembangunan apapun”. (*Wawancara dengan Bapak Yovenalis Lahajir, Direktur Lembaga Penelitian Pembangunan Dan Etnoekologi (LP2E), 06 April 2012*).

Dan hal yang senada juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat (LSM) Kabupaten Kutai Barat sebagai responden : “Kami sebagai masyarakat sangat mengharapkan keterbukaan didalam informasi. Dimana keterbukaan dimaksud, sangat membantu kami selaku mitra terdepan pemerintah dan pemerhati semua sektor pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Masyarakat bukan eksekutor tapi peran kami, lebih mengedepankan keterbukaan, sehingga dapat meminimalisir setiap upaya penyimpangan yang

dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”.(*Wawancara dengan bapak Yohanes , 06 April 2011*).

Dengan melihat dan menanggapi kebutuhan masyarakat akan informasi didalam pembangunan juga penyelenggaran pemerintahan, maka Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menanggapi : “Humas didalam menjalankan peranan dan fungsinya untuk menyampaikan dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat,akan lebih baik lagi,bila hal itu dilakukan dan dilaksanakan lebih taransparansi,guna terlaksananya keinginan searah,dan terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”. (*Wawancara dengan Toni Imang, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 07 April 2012*).

Dengan keterbukan dan transparanya informasi didalam penyelenggaran pemerintah melalui kehumasan maka pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi pemerintah dan bagi masyarakat dimana pemerintah dapat menjalankan progaram-program pembangunan yang telah dicanangkan sesuai dengan perencanaan dan bisa lebih cepat mendapat tanggapan yang positif sesuai dengan kebutuahan masyarakat yang menjadi objek pembangunan yang dilaksanakan.

Keterbukaan didalam informasi yang disampaikan humas juga bisa menjadi gambaran didalam pelaksanaan pembangunan.

Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Dalam hubungan pemerintah dan masyarakat adalah dimana lembaga harus memiliki citra positif maka dengan demikian dukungan Masyarakat (Publik) akan mengalir dengan sendirinya kepada lembaga pemerintah. Dukungan publik sangat mutlak diperlukan bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Sebuah lembaga tidak akan pernah hidup dan berkembang jika tidak pernah mendapatkan dukungan dari Masyarakat (Publik). Upaya untuk memperoleh dukungan adalah dengan membangun citra dan reputasi secara terus menerus. Sementara citra dan reputasi yang buruk, akan membawa lembaga tersebut pada keterpurukkan atau

bahkan akan kehilangan kepercayaan dan dukungan publik. Maka hal tersebut di tanggapinya Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat : “Didalam membangun kepercayaan masyarakat dan membangun hubungan anatarmasyarakat dan pemerintah, hal tersebut adalah sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kami sebagai salah satu kewajiban yang dilaksanakan secara terus menerus, sekaligus sebagai lembaga perpanjangan tangan dari Pemerintah kepada Masyarakat”.
(Wawancara dengan Bapak Toni Imang, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 08 April 2012).

Dan hal tersebut juga di tanggapinya oleh Bapak Achamad Sofiyani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kutai Barat : “Didalam melaksanakan suatu pemerintahan sangat mutlak perlu adanya pembinaan hubungan yang sinergi antara pemerintah dan masyarakat, oleh sebab itu, lembaga kehumasan secara umum baik lembaga induk, termasuk sub sub nya yang ada disetiap jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus bias membangun hubungan yang baik, guna tercapainya penyelenggaraan pemerintah yang baik, sebagai upaya pemulihan citra buruk pemerintah di mata masyarakat”.
(Wawancara dengan Bapak Achamad Sofiyani, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kutai Barat, 08 April 2012).

Dalam menjalankan tugasnya dimana humas sebagai penghubung antara masyarakat. Dengan adanya kerjasama yang baik antara unit kehumasan dengan lembaga induknya, maka diharapkan komunikasi dua arah sebagai cara dari lembaga kehumasan akan berjalan dengan baik dan check and balance serta membuat tujuan lembaga tercapai serta masyarakat akan puas dan memberikan citra yang positif terhadap lembaga Pemerintah guna membangun dan pembinaan hubungan yang baik.

Dengan demikian maka peran yang dilakukan oleh humas sangatlah penting, hal tersebut juga ditanggapi oleh Ketua Persidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak Yustinus Dullah Ketua Presidium Adat Kabupaten Kutai Barat : “Untuk sebuah pelaksanaan tatanan Pemerintahan yang baik maka perlu adanya komunikasi yang baik pula antara pemerintah dan masyarakat. Jika hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah

dapat berjalan searah, maka system penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri akan lebih baik lagi”. (*Wawancara dengan Bapak Yustinus Dullah, Ketua Presidium Adat Kabupaten Kutai Barat, 08 April 2012*).

Dan hal tersebut juga ditanggapi oleh Bapak Camat Linggang Bigung yaitu Bapak Adi Wijaya sebagai responden : “Perlu adanya hubungan dan jalinan check and balance antara Pemerintah dengan masyarakat jika hubungan tersebut terbangun dari awal dengan baik, maka citra pemerintah, pasti mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan sistem pemerintahan”. (*Wawancara dengan Bapak Adi Wijaya, Camat Linggang Bigung, 08 April 2012*).

Maka melihat hal tersebut pemerintah melalui humas sebagai perpanjangan tangan harus mampu membangun hubungan pemerintah maupun masyarakat guna menjalankan fungsi humas tersebut, pendelegasian wewenang serta pembentukan unit dan prangkat organisasi bagi kedudukan dan kapasitas humas sangatlah penting untuk diperhatikan.

Dengan terciptanya hubungan antara unit-unit yang ada dalam lembaga induk termasuk hubungan dengan instansi pemerintah dan juga hubungan dengan instansi vertikal maka tanpa disadari semuanya sudah mengakomodir kepentingan dan keinginan masyarakat secara umum. Humas merupakan fungsi strategis dalam menjalankan fungsi manajemen serta melakukan dan menciptakan komunikasi yang bijak untuk menimbulkan pemahaman dan penerimaan publik yang baik dan bijak pula.

Membina Citra dan Martabat Pemerintahan

Humas sebagai bagian dari lembaga perpanjangan tangan dari pemerintah kepada masyarakat maka humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsi dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, termasuk didalamnya program-program kegiatan-kegiatan kelembagaan kepada masyarakat secara transparan.

Humas merupakan motivator kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu dapat memperoleh kepercayaan dari publiknya, yakni masyarakat dalam arti luas. Maka dari itu sikap dan pelayanan yang baik sangat penting demi terciptanya citra yang baik, maka untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus memiliki citra dan reputasi yang baik dalam menjalankan fungsinya.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak Toni Imang mengatakan : “Didalam membina citra dan martabat pemerintah maka peran kehumasan harus selalu memberikan gambaran dan masukan yang positif kepada pemerintah, supaya tetap terciptanya atau terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap citra dan reputasi pemerintah itu sendiri”. (*Wawancara dengan Bapak Toni Imang, Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, 09 April 2012*)

Sesuai dengan peranan kehumasan maka Asisten Pemerintahan, Hukum Dan Humas Sekretariat Kabupaten Kutai Barat yaitu bapak Murni Neri menanggapi sebagaimana tugas pokok dan fungsi lembaga kehumasan :

“Sesuai dengan peranan kami sebagai bagian dari pemerintah atau perpanjangan tangan dari pemerintah, maka tugas pokok dan fungsi utama kami adalah, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah didalam menjalankan roda pemerintahan, baik upaya membangun citra dan reputasi pemerintah untuk tercapai dan terciptanya pemerintahan yang bermartabat serta dapat diterima dan dipercaya oleh semua kalangan”. (*Wawancara dengan bapak Murni Neri, Asisten Pemerintahan, Hukum Dan Humas Kabupaten Kutai Barat, 09 April 2012*).

Dengan demikian kehumasan atau humas pemerintah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat luas dan kompleks. Terlebih membina citra dan martabat pemerintah guna terciptanya pemerintahan yang transparansi, yang akuntabilitasnya dapat diterima publik. Maka menanggapi hal tersebut bapak Natanael salah seorang Ketua Yayasan Pembangunan di Kabupaten Kutai Barat yang menjadi salah satu responden mengatakan : “Memang peranan humas sebagai salah satu lembaga perpanjangan tangan dari Pemerintah. Intinya, humas harus bisa membina dan memberikan masukan didalam kebijakan dalam

perencanaan termasuk penyelenggaraan pemerintahan, supaya citra dan martabat pemerintah, tetap baik dan mendapatkan kepercayaan penuh dari Publik”.
(*Wawancara dengan Bapak Natanael, 10 April 2012*)

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut pemerintah harus memiliki pola pikir dan sumber daya aparatur yang bijak dan baik didalam menjalankan perannya untuk membangun citra dan martabat pemerintah, serta kerja sama antara instansi baik antara unit kehumasan dengan lembaga induknya, maka diharapkan komunikasi dua arah sebagai cara dari kehumasan akan berjalan dengan baik dan membuat tujuan lembaga tercapai untuk mendapat dukungan lingkungan dan kelembagaan yang kuat. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yaitu Bapak Misran Effendi menanggapi : “Perlu adanya kerjasama yang baik antara unit kehumasan dengan lembaga induknya, maka diharapkan komunikasi dua arah sebagai cara dari kehumasan akan berjalan dengan baik dan membuat tujuan lembaga tercapai serta masyarakat akan puas dan memberikan citra yang positif dan rasa hormat terhadap lembaga apa saja. (*Wawancara dengan Bapak Misran Effendi, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, 09 April 2012*).

Dengan hasil wawancara diatas maka didapati sebuah kesimpulan, bahwa untuk membangun citra dan martabat Pemerintah maka kehumasan wajib menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya guna membuat tujuan lembaga tersebut tercapai serta masyarakat akan puas dan memberikan citra yang positif terhadap citra kelembagaan.

Humas dalam lembaga pemerintahan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi dan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintahan dan juga prtanggung jawaban kepada masyarakat, dimana lembaga kehumasan merupakan kelanjutan dari proses penetapan kebijakan pemerintah, dalam pemberi layanan informasi kepada masyarakat, sehingga humas itu berada, dan memperoleh kepercayaan dari publiknya demi

terciptanya citra yang baik dan profesional didalam menjalankan penyelnggaran pemerintahan.

Faktor-faktor penghambat Kehumasan dalam Membangun Citra Pemerintah Di Kabupaten Kutai Barat

Faktor Penghambat peran kehumasan dalam membangun citra dan Jatidiri Pemerintahan, dikarenakan sistem pelaksanaannya yang belum berjalan dengan baik dimana fungsi humas secara keorganisasian dan kelembagaan yang defenisinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, terkadang tidak berperan aktif didalam fungsinya secara professional sehingga humas tidak memiliki kualifikasi memadai, dimana kegiatan-kegiatan humas pada dasarnya diarahkan untuk, memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas pokok, fungsi, aktivitas dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah daerah atau kebijaksanaan yang di jalankan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum secara menyeluruh dijalankan oleh peran lembaga kehumasan itu sendiri dikarenakan sistem pengorganisasian didalam kehumasannya tidak terlaksana sesuai ketentuan. Faktor penghambat lainnya adalah dimana peran penting kehumasan diberikan kepada pegawai atau aparatur yang tidak berkompentensi didalam menjalankan tugas fungsi kehumasan.

Permasalahan lain juga sering timbul karena dogma dan gaung otonomi daerah sehingga trend kebijakan kadang menyimpang dari garis komando aturan-aturan yang mengikat masalah kepentingan dimaksud. Hal seperti inilah yang menjadi faktor-faktor penghambat fungsi dan peran kehumasan dalam menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Kehumasan dalam upaya membangun citra Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang baik,bersih dan berwibawa.

Penutup

Peran Kehumasan dalam Membangun Citra Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat, baik melalui pengamatan penulis, juga melalui informasi yang diperoleh dari semua pihak responden bahwa, segala sesuatunya yang

berhubungan dengan konsentrasi penelitian, sudah berjalan cukup baik, didalam menyampaikan informasi-informasi mengenai program penyelenggaraan pemerintah, dan semua stakeholder, disadari bahwa peran kehumasan dimaksud, sangat spesial dan efektif didalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya, dalam upaya penyediaan jasa pelayanan, informasi dan pembinaan secara merata.

Kehumasan dalam menjalin kemitraan dengan semua stakeholder di dalam Wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menciptakan hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkompetensi melalui, lembaga kehumasan secara umum sebagai bagian dari pusat informasi yang efektif dan akuntable dalam pembinaan khususnya, membangun hubungan baik antar pemerintah dan masyarakat, untuk dapat bekerjasama didalam memberikan evaluasi, dukungan termasuk pengamanan semua kebijakan.

Peranan Kehumasan didalam Membangun Citra dan Reputasi Pemerintah di Kabupaten Kutai Barat, saat ini sudah mendapat pengakuan keberadaannya oleh semua kalangan sehingga *image* dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan masih dalam kondisi toleransi.

Faktor-faktor Penghambat pada saat-saat menjalankan Peran dan Fungsi Kehumasan dalam Upaya Membangun Citra Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat dikarenakan masih adanya kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh lembaga Inti atau Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD), atau pemegang kebijakan sering kali terlepas dan menyimpang dari aturan resmi, juga kendali fungsi dan peranan kehumasan itu sendiri.

Faktor-faktor penghambat lainnya adalah, muncul akibat kebijakan searah, dan masih adanya praktek prioritas kepentingan, sistem pengkotakan, pengelompokan, baik melalui jalur paham, atau kebutuhan etnis tertentu yang akibatnya mengobrak abrik citra dan reputasi pemerintah di mata masyarakat yang merasa tersisih dan terkalahkan karena munculnya kebijakan-kebijakan yang menyimpang dari hati nurani penikmat pembangunan.

Dalam menjalankan fungsi peran kehumasan, lembaga kehumasan secara umum, lebih terbuka dan transparansi didalam menyampaikan informasi-

informasi untuk program pemerintah, sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap citra pemerintah.

Dalam menjalankan peran kehumasan didalam membangun dan menciptakan hubungan antar pemerintah dan masyarakat harus lebih fokus ke transparansi informasi, dimana peranan kehumasan harus berdiri netral tanpa muatan afiliasi dengan pihak manapun.

Didalam Membangun Citra dan Reputasi Pemerintah hendaknya Tugas Pokok dan Fungsi Kehumasan dapat dilakukan secara terus-menerus, baik itu penyaluran opini masyarakat secara umum, juga masukan-masukan positif, inovatif kepada pemerintah guna terciptanya hubungan kepentingan yang benar-benar searah dan hasil aspirasi.

Selanjutnya saran bagi penyelesaian faktor penghambat didalam peran kehumasan untuk Membangun Citra dan Reputasi Pemerintah di Kabupaten Kutai Barat diharapkan, pemerintah harus memiliki sistem dan manajemen yang baik, aparatur yang professional dan proporsional dalam bidang dan disiplinnya untuk akurasi informasi didalam menyampaikan informasi, membina hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat serta membina citra dan martabat aparturnya secara terus menerus.

Menjalankan fungsi *control, monitoring* secara berkala bagi aparatur guna evaluasi tugas pokok dan fungsinya masing masing. Bila perlu, pemberlakuan *system reward* dan jangan hanya mengedepankan funishman tetapi membelakangi pembinaan moral / mental aparatur guna tercapainya pemerintahan dan aparatur yang benar-benar bersih dan berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004* : Tentang otonomi daerah. Gramedia.Jakarta
- Goodson, Mark. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Jakarta
- J. moelong, Lexy.2001. *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya, jakarta
- Liang, Gie. 2000. *Administrasi perkantoran moderen*. Gramedia, Yogyakarta.
- Matthew B.Miles & A.Michael Huberman.1992. *Analisis data kualitatif*. Raja Grafika Media, Jakarta.

- Raharjo, Madekhan. 2007. *Pemerintahan Desa*. Grafika Persada. Yogyakarta
- Sugiono. Riduwan .2002. *Teknik penelitian kualitatif*. Gramedia. Yogyakarta.
- Sutarto.2002. *Perilaku organisasi,Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 60 Tahun 2008 tentan Tupoksi dan Uraian tugas Struktural di lingkungan Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Dalam Negeri
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.